

**PENILAIAN TINGKAT KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGUNAKAN ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA
DPPKAD (DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KABUPATEN BOYOLALI
PERIODE TAHUN 2011-2013**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

M. ARIF KURNIAWAN

B 100110100

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :

**PENILAIAN TINGKAT KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGUNAKAN ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA
DPPKAD (DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KABUPATEN BOYOLALI
PERIODE TAHUN 2011-2013**

Yang ditulis oleh :

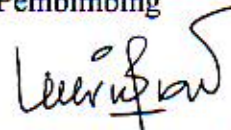
M. ARIF KURNIAWAN

B 100110100

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 12 Juni 2015

Pembimbing



(Dra. Wuryaningsih DL, M.M.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, Msi)


ii

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Boyolali berdasarkan analisis rasio keuangan kemandirian pada periode tahun 2011-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1). Data kualitatif 2). Data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa gambaran umum Kabupaten Boyolali, daftar SKPD di Kabupaten Boyolali, gambaran umum organisasi, laporan keuangan APBD T.A 2011, T.A 2012, T.A 2013. Metode analisis data penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah data sekunder berupa kuantitatif yang meliputi data keuangan APBD dan realisasinya dengan melalui rasio keuangan dan analisis perbandingan untuk memperoleh tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Boyolali.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini 2). Mengumpulkan untuk memperoleh gambaran umum dari objek penelitian 3). Mempelajari dan mengevaluasi data yang telah diperoleh dari objek penelitian 4). Mengolah dan menata data yang diperoleh dari objek penelitian 5). Melakukan perbandingan dari hasil yang diperoleh dengan teori yang ada 6). Membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

Hasil analisis pengolahan data pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali disimpulkan bahwa 1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 berkisar antara 8,00%-11,06% yang menunjukkan rasio keuangan daerah instruktif atau kemampuan daerahnya rendah sekali 2). Rasio Efektivitas Terhadap PAD Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 berkisar antara 100,30%-109,21% yang menunjukkan rasio efektivitas terhadap PAD sangat efektif atau kemampuan daerahnya tinggi 3). Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 berkisar antara 97,17%-100,53% yang menunjukkan rasio efisiensi keuangan daerah kurang efisiensi atau kemampuan daerahnya kurang 4). Rasio Belanja Aparatur Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 berkisar antara 68,39%-71,73% yang menunjukkan rasio belanja aparatur cukup serasi atau kemampuan daerahnya cukup, Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 berkisar antara 28,27%-31,60% yang menunjukkan rasio belanja pembangunan sangat serasi atau kemampuan daerahnya tinggi.

Kata kunci: Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.

ABSTRACTION

The purpose of this research is financial performance: to know the district government Boyolali based on analysis of financial independence in the period the ratio of 2011-2013 year. The data used in this research is as follows: 1). Qualitative data 2). Quantitative data. The data used in quantitative data of this research is the realization of the budget report. Data sources used in this research is data priomer Boyolali district of a general picture, the list of SKPD Boyolali in the district, the organization of a general picture, financial reports budget T.A 2011, T.A 2012, T.A 2013. This research data analysis method used to analyze the results of this research is of secondary data such as quantitative which includes the realization of regional and financial data through the ratio of financial analysis and comparison to obtain the level of financial performance Boyolali the district.

The technique of the analysis used in this research is as follows: 1). By way of collecting data related to this research 2). Gather to get the general idea of the research 3). Study and evaluate the data they already obtained from the research 4). Prepare and make the data from the research 5). Did side-by-side comparisons of the results obtained by theory that there are 6). Make inferences from research and provide advices are deemed necessary.

The analysis result data processing on locals government financial performance Regency Boyolali is concluded that 1). Financial independence ratio Boyolali Regency Region on year 2011 2013 ranging among 8,00% - 11,06% one point out region finance ratios instruktif or its region abilities contemns once 2). Effectiveness ratio to PAD Boyolali Regency on year 2011 2013 ranging among 100,30% - 109,21% one point out effectiveness ratio to PAD so effective or its region abilities tall 3). Financial Efficiency ratio Kabupaten Boyolali Region on year 2011 2013 ranging among 97,17% - 100,53% one point out financial efficiency ratios region less efficiency or its region abilities less 4). Regency Apparatus Expense ratio Boyolali on year 2011 2013 ranging among 68,39% - 71,73% one point out enough apparatus expense ratios convenient or its region abilities enough, Regency Development Expense ratio Boyolali on year 2011 2013 ranging among 28,27% - 31,60% one point out development expense ratios so convenient or its region abilities tall.

Key word: Good governance (*Good Governance*), Governances financial performance Region.

A. PENDAHULUAN

Mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan adanya perubahan sistem paradigma pemerintahan dari yang sistem lama (sentralisasi) ke sistem baru (desentralisasi). Sebelum adanya otonomi daerah pada orde baru pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem sentralisasi yaitu semua peraturan wewenang pemerintahan daerah bahkan yang mengatur rumah tangganya sendiri harus dikerjakan atau diwenangkan kepada pemerintahan pusat berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Istilah sentralisasi itu sendiri adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi, disini dalam sistem pemerintahan pada struktur organisasi puncaknya adalah pemerintahan pusat. Sedangkan istilah dari desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan atau urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejak memasuki masa otonomi daerah Indonesia menerapkan Undang-undang nomer 22 tahun 1999 kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, lalu munculah Undang-undang baru yang diperbaharui dari Undang-undang lama yang mengatur keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun

1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004. Dalam undang-undang No.32 tahun 2004 didalamnya terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah tingkat II, yaitu sebagai berikut : Syarat administratif, Syarat teknis, serta Syarat fisik kewilayahan. Syarat administratif untuk provinsi mencakup beberapa hal : Adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten atau Kota dan Bupati atau Walikota yang akan menjadi acuan wilayah provinsi, persetujuan dari DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Adanya otonomi daerah pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur, mengurus dan mengelola sumber daya serta memaksimalkan potensi masyarakat daerahnya dan pelaksanaan otonomi daerah haruslah dilaksanakan dengan sistem desentralisasi yang transparan, efektif, dan efisien agar dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat luas.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian otonomi daerah mempunyai banyak arti dari pendapat beberapa ahli menurut (Anonim, 2004) otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hak otonomi untuk masing-masing daerah atau kabupaten yang berada di Indonesia termasuk Kabupaten Boyolali akan diberikan kebebasan kepada setiap daerah atau kabupaten untuk mengelola pendapatan dan meningkatkan dan perekonomian daerahnya.

Menurut Mardiasmo (2002), otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada pimpinan daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang mampu meningkatkan partisipasi yang aktif dari masyarakat, karena didalamnya terdapat tiga misi utama yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efektivitas dan efesiensi dalam mengelola sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat.
3. Menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi dan daerah.

Strategi yang tepat dalam memberdayakan daerahnya maka akan semakin meningkatkan dan memajukan kemampuan dan potensi sumber daya manusia yang ada. Hal ini berhubungan dengan pasal 156 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 yang menjelaskan kepala daerah merupakan peranan penting kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah. Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keuangan Daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang untuk mengetahui kemampuan bagaimana suatu daerah membiayai kepentingan, dan keperluan-keperluan daerahnya sendiri tanpa adanya

bantuan subsidi dari pemerintah pusat atau dengan memaksimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai peranan sumber keuangan daerah.

Analisis Rasio Keuangan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah Kabupaten dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda.

Rasio Keuangan. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan yang bersumber dari APBD antara lain : rasio kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah; rasio efisiensi untuk mengukur efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; rasio keserasian untuk mengetahui bagaimana pengalokasian dana belanja daerah pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik (Halim, 2007).

Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan (Anonim, 2004). Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten di Indonesia termasuk di Kabupaten Boyolali akan memberikan kebebasan

setiap daerah atau Kabupaten untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan rakyat khususnya daerah. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya mencerminkan bahwa kinerja suatu daerah juga tinggi sesuai dengan hasil yang dicapai.

Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja adalah hasil tingkat pencapaian dalam melaksanakan suatu kegiatan/program/dan kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi, perusahaan ataupun instansi pemerintah yang terdapat dalam strategi *planning* yang menyangkut suatu organisasi, perusahaan dan instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah haruslah berisi tentang pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, meliputi beberapa indikator yaitu indikator input, indikator proses, indikator *output*, indikator *outcome*, indikator benefit dan indikator *impact*.

Laporan Keuangan. Laporan keuangan tahunan dapat meliputi Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan laba ditahan dan laporan Arus Kas. Didalam laporan keuangan ada dua macam informasi yang penting yang dipertujukan, yaitu pertama dari bagian uraian, yang berupa kata pengantar dari pimpinan perusahaan atau instansi, yang kedua menggambarkan hasil usaha kegiatan perusahaan atau instansi selama satu periode (satu tahun) yang membahas perkembangan-perkembangan atau *progress* baru yang sangat mempengaruhi kegiatan perusahaan atau instansi dimasa yang mendatang.

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja serta untuk memantau perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan yang berguna sebagai pengambilan keputusan ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi di Indonesia terdapat tiga sektor yang dipakai di dalamnya, yaitu : sektor privat, sektor publik dan sektor nir laba.

Review Penelitian Terdahulu. Dalam menyusun penelitian diperlukan review penelitian yang terdahulu. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tidak semua hasil analisis itu menunjukkan hasil yang baik. Maka dalam review yang diambil tidak jauh beda dengan masalah diatas, review yang diambil antara lain:

Mohammad Rofiuddin (2012) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Dalam Era Otonomi Daerah Tahun 2005 – 2009.

- a. Derajat desentralisasi fiskal daerah 4 Kabupaten (Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep) di Pulau Madura dalam kategori rendah sekali.
- b. Rasio ketergantungan keuangan daerah 4 kabupaten di Pulau Madura dalam kategori tinggi.
- c. Sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah 4 Kabupaten di Pulau Madura dalam kategori rendah sekali.

Oldison Santosa, Janjte J. Tinangon, dan Inggriani Elim (2014) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- a. Rasio efektivitas kinerja keuangan Dinas PPKA kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan hasil cukup efektif dan cenderung ke efektif jika dilihat dari penilaian kinerja keuangan.
- b. Rasio kemandirian keuangan Dinas PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan dikatakan rendah sekali.
- c. Rasio pajak terhadap PAD, maka kinerja keuangan Dinas PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe dikatakan kurang.

C. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis dan melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data penelitian kuantitatif dengan hasil studi kasus yang sebenarnya yang diperoleh dari objek yang telah saya teliti yaitu pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tepatnya di Kabupaten Boyolali. Rasio – rasio keuangan yang relevan, yaitu antara lain: (1) Kemandirian Keuangan Daerah, menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (2) Efektivitas Terhadap PAD, menjelaskan akan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (3) Efisiensi Keuangan Daerah, menggambarkan perbandingan

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (4) Keserasian Keuangan Daerah, menggambarkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Berdasarkan kajian penelitian dapat disusun kerangka berpikir dalam gambar 1.



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

Jenis Data dan Sumber Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, dan kata. (2) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa gambaran umum Kabupaten Boyolali, daftar SKPD di Kabupaten Boyolali, gambaran umum organisasi, Laporan Keuangan APBD T.A 2011, T.A 2012, T.A 2013.

Teknik Analisis Data. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam menganalisis keuangan, karena analisis keuangan dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan.

Analisis Rasio Keuangan. Macam-macam rasio yang digunakan untuk menilai kinerja DPPKAD Kabupaten Boyolali periode tahun 2011-2013, adalah

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- b. Rasio Efektivitas Terhadap PAD, menjelaskan akan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
- c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

- d. Rasio Kesenjangan Keuangan Daerah, menggambarkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

D. HASIL PENELITIAN

Dalam menganalisis rasio, dimana dalam penelitian ini dapat diukur melalui analisis rasio laporan keuangan. Dengan menggunakan analisis laporan keuangan pemerintah daerah dapat melihat dan mengukur hubungan tertentu yang berguna dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah. Adapun hasil analisis rasio keuangan DPPKAD Kabupaten Boyolali pada periode 2011-2013 adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian di Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 mengalami gerakan yang cukup signifikan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2011 Kabupaten Boyolali mempunyai nilai 8% yang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013. Sedangkan pada tahun 2012 Kabupaten Boyolali mempunyai nilai lebih besar dari tahun 2011 yaitu sebesar 9,87%. Pada tahun 2013 merupakan tahun dengan mendapatkan rasio kemandirian paling besar yaitu mempunyai nilai hingga mencapai 11,06%.

Kenaikan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dikarenakan pertumbuhan PAD yang rata-rata 34,64% dan juga

meningkatnya transfer daerah yang pertumbuhannya rata-rata mencapai 13,41%. Selisihnya pertumbuhan mencapai 21,23 % ini masih belum berpengaruh pada Kabupaten Boyolali, dan pada pertumbuhan PAD juga belum terlalu berpengaruh kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Dan sebaliknya apabila PAD lebih besar dibandingkan dengan transfer daerah maka rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Boyolali akan mengalami peningkatan dan PAD tersebut semakin berpengaruh kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Boyolali yaitu 9,64% sehingga masuk dalam kategori instruktif dan dalam kemampuan daerahnya masuk dalam kategori rendah sekali yang artinya daerah tersebut masih sangat kurang dalam mensejahterakan masyarakatnya atau masih tergantung pada pemerintah pusat.

2. Rasio Efektivitas Terhadap PAD

Rasio Efektivitas di Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2011 Kabupaten Boyolali mempunyai nilai 109,21% yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013. Sedangkan pada tahun 2012 Kabupaten Boyolali mempunyai nilai lebih sedikit dari tahun 2011 yaitu sebesar 102,56%. Pada tahun 2013 merupakan tahun dengan mendapatkan rasio efektivitas paling rendah yaitu mempunyai nilai 100,30%.

Rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Boyolali yaitu 104,02% sehingga masuk dalam kategori sangat efektif dan dalam kemampuan daerahnya masuk dalam kategori tinggi yang artinya daerah tersebut berpotensi dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui rasio efektivitas Kabupaten Boyolali.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali

Rasio efisiensi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2011 Kabupaten Boyolali mempunyai nilai 100,53 % yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013. Sedangkan pada tahun 2012 Kabupaten Boyolali mempunyai nilai lebih sedikit dari tahun 2011 yaitu sebesar 99,84 %. Pada tahun 2013 merupakan tahun dengan mendapatkan rasio efektivitas paling rendah yaitu mempunyai nilai 97,17 %.

Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Boyolali yaitu 99,18% sehingga masuk dalam kategori kurang efisien dalam kemampuan daerahnya masuk dalam kategori kurang untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui rasio efisien keuangan daerah Kabupaten Boyolali

4. Rasio Keserasian

a. Belanja Aparatur

Rasio belanja aparatur di Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2011

Kabupaten Boyolali mempunyai nilai 71,73% yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013. Sedangkan pada tahun 2012 Kabupaten Boyolali mempunyai nilai lebih sedikit dari tahun 2011 yaitu sebesar 68,39%. Dan pada tahun 2013 mempunyai nilai 68,69%.

Rata-rata rasio belanja aparatur Kabupaten Boyolali yaitu 69,60% sehingga masuk dalam kategori cukup serasi dalam kemampuan daerahnya untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui rasio belanja aparatur Kabupaten Boyolali

b. Belanja Pembangunan

Rasio belanja pembangunan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2011 Kabupaten Boyolali mempunyai nilai 28,27% yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013. Sedangkan pada tahun 2012 Kabupaten Boyolali mempunyai nilai lebih tinggi dari tahun 2011 yaitu sebesar 31,60%. Dan pada tahun 2013 mempunyai nilai 31,30%.

Rata-rata rasio belanja pembangunan Kabupaten Boyolali yaitu 30,39% sehingga masuk dalam kategori sangat serasi dalam kemampuan daerahnya untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui rasio belanja pembangunan Kabupaten Boyolali.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali disimpulkan bahwa:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 - 2013 berkisar antara 8,00% - 11,06% yang menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah instruktif atau kemampuan daerahnya rendah sekali.

2. Rasio Efektivitas Terhadap PAD

Rasio Efektivitas Terhadap PAD Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 – 2013 berkisar antara 100,30% - 109,21% yang menunjukkan rasio efektivitas terhadap PAD sangat efektif atau kemampuan daerahnya tinggi.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 – 2013 berkisar antara 97,17% - 100,53% yang menunjukkan rasio efisiensi keuangan daerah kurang efisiensi atau kemampuan daerahnya kurang.

4. Rasio Keserasian

a. Belanja Aparatur

Rasio Belanja Aparatur Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 – 2013 berkisar antara 68,39% - 71,73% yang menunjukkan rasio belanja aparatur cukup serasi atau kemampuan daerahnya cukup.

b. Belanja Pembangunan

Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Boyolali pada tahun 2011 – 2013 berkisar antara 28,27% - 31,60% yang menunjukkan rasio belanja pembangunan sangat serasi atau kemampuan daerahnya tinggi.

Semua hasil penelitian dan kesimpulan tersebut juga menghasilkan saran yang bermanfaat sebagai pembenahan untuk kedepannya, saran itu antara lain meliputi:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali

Guna untuk meningkatkan kemandirian daerahnya maka diperlukan peningkatan PAD yang signifikan karena apabila PAD lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerahnya maka akan sangat berpengaruh kontribusinya terhadap pertumbuhan daerah. Sedangkan untuk meningkatkan efisiensi daerah maka belanja daerahnya lebih diproyeksi atau dikontrol lagi dan meningkatkan pendapatan daerah dengan cara lebih mengoptimalkan PAD, dana perimbangan, dan juga pendapatan daerah yang lain-lain yang sah. Sedangkan guna lebih menserasikan belanja aparatur daerah maka belanja rutin lebih ditinggikan lagi dari belanja pembangunan.

2. Bagi Akademis

Bagi akademis semoga dengan penelitian ini dapat lebih meningkatkan dan memberikan informasi dalam menganalisa kinerja keuangan daerah karena keuangan daerah merupakan inti pokok untuk menjalankan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

<http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah/>

<http://keuanganlsm.com/konsep-entitas-dan-pengakuan-pada-akuntansi-pemerintahan/>

Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Ketiga Yogyakarta: Erlangga.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

-----, 2012, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

Halim Abdul, et.al. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi 3*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. ANDI.

Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Pramono Joko (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Dosen Tetap STIE AMA Salatiga.

Purnamasari, Desak Made Ita (2014). “*Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011*”. Jurusan Manajemen Fakultas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Simamora, Henry. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke Dua Belas*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.